



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 147);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
9. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, FASILITASI TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor, Fasilitasi Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris DPRD ini :
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
  3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
  4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA : Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Memeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA  
 HASIL PEKERJAAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA  
 PELAYANAN UMUM KANTOR, FASILITASI TUGAS PIMPINAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, FASILITASI RAPAT KOORDINASI  
 DAN KONSULTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN  
 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI  
 PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN SUB KEGIATAN  
 PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, FASILITASI TUGAS PIMPINAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI  
 DAN KONSULTASI PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Edy Sumanto	197706151997031002	Pejabat Pengadaan
2	Suhardi, S.IP.	196610091987021002	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
3	Suhardi, S.IP.	196610091987021002	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4	Suhardi, S.IP.	196610091987021002	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
5	Sadono Wicaksono Putro	197103232008011003	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
6	Triyono	198402162010011005	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Yuliyanto	197806252008011016	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Supriyono	197105072008011006	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA